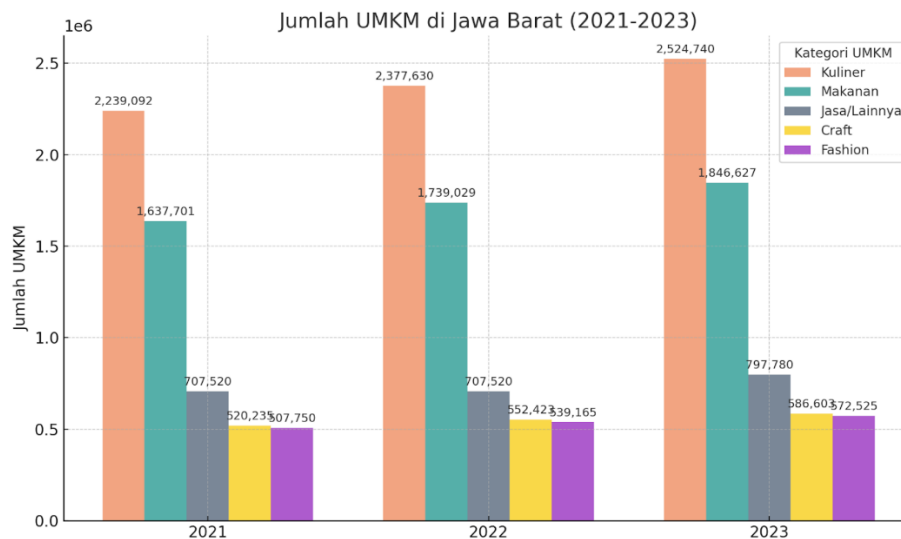


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai usaha mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Jenis usaha ini dapat berfungsi sebagai dasar dari perkembangan sektor perekonomian masyarakat, terutama di sektor ekonomi. UMKM tidak memerlukan modal yang besar seperti perusahaan besar, sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar (Nur Sarfiah et al., 2019).



Gambar 1. 1 Jumlah UMKM di Jawa Barat (2021-2023)

Sumber: Open Data Jawa Barat (2024)

Pengembangan UMKM merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia. Salah satu provinsi yang memiliki

peran vital dalam mendukung perekonomian daerah ialah Jawa Barat (Sariwulan et al., 2023). Menurut Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat pada tahun 2025 diproyeksikan akan tumbuh dalam rentang 5% sampai 5,84%. Menurut Open Data Jawa Barat, pada tahun 2023, Provinsi Jawa Barat menempati posisi tertinggi dengan jumlah UMKM terbanyak, disusul oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meskipun menghadapi banyak tantangan, beberapa kota berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Barat. Kota Bandung, yang dikenal sebagai pusat industri kreatif dan perdagangan, merupakan salah satu kota yang memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat (Sonjaya, 2024).

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM Sektor Kuliner di Kota-Kota Besar

No	Kota	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Bandung	8.500	9.200	10.181
2	Yogyakarta	25.757	26.984	28.258
3	Surabaya	4.083	9.911	12.320
4	Manado	5.102	2.233	2.992
5	Bogor	5.669	2.026	11.509

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di sejumlah kota, UMKM di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan pada periode 2021 hingga 2023, terutama di wilayah perkotaan. Selama rentang waktu tersebut, mayoritas kota mencatat peningkatan jumlah UMKM yang pesat. Dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya seperti Yogyakarta, Surabaya, Bogor, dan Manado, Kota Bandung menunjukkan konsistensi dalam peningkatan jumlah pelaku usaha.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung, jumlah penduduk di Kota Bandung pada tahun 2024 mencapai 2.714.220 jiwa. Pemilihan UMKM di Kota Bandung sebagai objek penelitian ini didasari pada beberapa oleh beberapa pertimbangan strategis. UMKM di Kota Bandung memiliki karakteristik yang beragam dan dinamis, yang mencerminkan potensi besar dari ekonomi kreatif kota ini. Menurut

Diskominfo Kota Bandung, sektor ekonomi kreatif di Kota Bandung mencakup berbagai sektor seperti kuliner, *fashion*, kerajinan, musik, film dan desain. Perkembangan pesat sektor-sektor tersebut tidak terlepas dari semangat kewirausahaan dan budaya inovatif yang kuat di kalangan masyarakat. Selain itu, Kota Bandung juga memiliki jumlah UMKM yang cukup besar, dengan sektor kuliner menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam perekonomian daerah.

Tabel 1. 2 Jumlah UMKM di Kota Bandung

No	Kategori Usaha	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Fashion	262	131	163	154
2	Handicraft	71	40	64	53
3	Jasa	121	53	67	56
4	Kuliner	831	355	558	670
5	Perdagangan	482	98	90	73
6	Lainnya	83	45	69	31
Jumlah UMKM		1850	722	1011	1037

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung (2024)

Menurut Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung, Kategori kuliner menunjukkan jumlah UMKM terbesar dengan 831 unit usaha pada tahun 2021, tetapi menurun menjadi 355 pada tahun 2022 sebelum kembali meningkat lagi pada tahun 2023 dengan 558 unit usaha. Pola serupa terlihat untuk semua kategori usaha, karena pada tahun 2022, semua kategori mengalami penurunan karena pandemi COVID-19. Pada tahun 2024 hanya sektor kuliner yang meningkat, yaitu menjadi 670. Maka dari data tersebut menggambarkan bahwa sektor kuliner merupakan sektor tertinggi selama empat tahun terakhir.

Tabel 1. 3 Daftar 5 Kecamatan dengan jumlah UMKM terbanyak

No	Kecamatan	Klasifikasi Usaha			Total
		Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	
1	Coblong	756	17	0	773
2	Buahbatu	407	32	0	439
3	Bojongloa Kidul	406	27	1	434

4	Sukajadi	427	7	0	434
5	Batununggal	396	20	1	417

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung (2024)

UMKM di Kecamatan Bandung membantu serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung mencatat bahwa, kecamatan Coblong memiliki jumlah UMKM tertinggi dengan 773, diikuti oleh kecamatan Buahbatu dengan total 439 UMKM serta Bojongloa Kidul dan Sukajadi dengan total 434 UMKM. Industri kuliner mendominasi di 5 kecamatan tersebut. UMKM di kecamatan Kota Bandung membantu pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran khususnya bagi masyarakat kelas menengah kebawah (Maulani, 2024). Banyak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjalankan bisnis seperti warung kecil, kafe hingga restoran yang menyediakan berbagai macam makanan. Mereka memberikan nilai tambahan kepada para pelanggan mereka sambil mempertahankan harga bersaing dengan melihat harga yang ditawarkan oleh kompetitor (Utama, 2019).

Terdapat perbedaan data jumlah UMKM antara BPS dan Dinas Koperasi dan UMKM di tingkat daerah. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan metode pencatatan dan cakupan pendataan, di mana BPS mencatat pelaku usaha secara lebih luas termasuk pelaku yang belum memiliki legalitas usaha. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan data dari Dinas Koperasi karena Dinas Koperasi terlibat langsung dalam proses pendataan, pembinaan, dan pengawasan UMKM, terutama di sektor kuliner yang menjadi fokus utama penelitian ini.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian di Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia saat ini terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 66 juta unit yang tersebar di berbagai sektor. Peran UMKM sangat penting bagi perekonomian di Indonesia,

dengan kontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp9.580 triliun (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024). UMKM memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan nasional dan berkontribusi besar bagi ekonomi inklusif. UMKM, yang merupakan alternatif untuk meningkatkan perekonomian masih menghadapi sejumlah masalah. Modal, produksi, kekurangan sumber daya manusia dan pemasaran produk merupakan masalah internal yang menghambat pertumbuhan UMKM (Candraningrat et al., 2021). Akses Masyarakat yang terbatas ke lembaga keuangan adalah faktor eksternal yang menghambat pertumbuhan UMKM (Sailendra, 2020).

Usaha mikro dan kecil memiliki keunggulan dalam industri yang memanfaatkan sumber daya alam dan dan padat karya. Ini terutama berlaku dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, rumah makan dan restoran. Usaha menengah memiliki keunggulan dalam menciptakan nilai tambah di industri hotel, keuangan dan kehutanan. Usaha besar memiliki keunggulan di industri listrik, gas, minyak dan pertambangan (Fikriansyah, 2022). Ini membuktikan UMKM dan usaha besar saling membutuhkan dan saling melengkapi, meskipun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Indonesia lebih banyak dalam penyerapan tenaga kerja hingga kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia (Nur Sarfiah et al., 2019).

Tabel 1. 4 Data UMKM 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah UMKM (Juta)	64	65.46	65	66	>66
Pertumbuhan (%)	-2.24%	2.28%	-0.70%	1.52%	

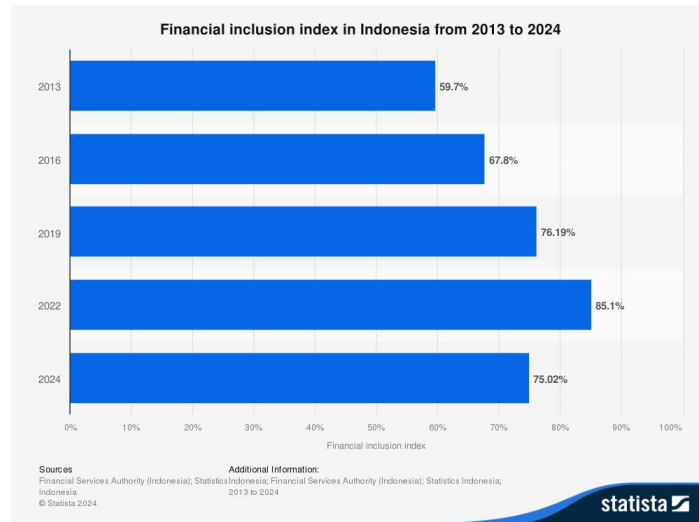
Sumber: Kadin Indonesia (2024)

Tabel 1.3 menunjukkan data UMKM tahun 2020-2024. Meskipun pandemi dan kebijakan pembatasan sosial sempat menyebabkan perlambatan ekonomi Indonesia pada tahun 2020, banyak pelaku usaha yang terkena dampak pandemi beralih ke sektor UMKM, khususnya dalam bidang perdagangan online dan industri kuliner. Pasca pandemi, jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan secara bertahap berkat

dukungan dari pemerintah. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pada tahun 2022, dari 34 Provinsi di Indonesia, Provinsi Jawa Barat menempati posisi tertinggi dengan 1.494.723 unit, disusul oleh Jawa Tengah dengan 1.457.126 unit, dan Jawa Timur dengan 1.153.576 unit. Menurut data terbaru dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung, UMKM di Kota Bandung didominasi oleh sektor kuliner dan *fashion*.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Bandung telah merencanakan berbagai macam program, termasuk bantuan modal untuk pelaku UMKM serta menggelar kegiatan padat karya oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) (Arianto, 2023). Meskipun memiliki potensi yang besar, para pelaku UMKM di Kota Bandung masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang mereka hadapi adalah terbatasnya akses terhadap lembaga dan layanan keuangan (Sariwulan et al., 2023). Akibatnya, mereka seringkali terlibat dengan institusi keuangan non-formal (Ulfah, 2024). Dalam situasi tersebut, mereka cenderung menghadapi sejumlah masalah seperti kesulitan dalam membayar tagihan, minimnya dana darurat, hingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Firmialy & Hidayat, 2022).

Berdasarkan peraturan OJK Nomor 76 Tahun 2016, inklusi keuangan didefinisikan sebagai ketersediaan akses terhadap berbagai lembaga, produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inklusi keuangan menawarkan layanan keuangan seperti tabungan, asuransi, kredit, dan sistem pembayaran dengan harga yang terjangkau, khususnya bagi pelaku usaha yang berpenghasilan rendah (Afandi et al., 2022). Inklusi keuangan bertujuan untuk menghilangkan semua penghalang yang menghalangi masyarakat untuk menggunakan infrastruktur dan layanan keuangan (Gunawan et al., 2023). Inklusi keuangan berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, serta membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, baik antar individu maupun antar wilayah (Dyah Praptitorini et al., 2022). Oleh karena itu, inklusi keuangan bukan sekedar pilihan, melainkan suatu keharusan dengan perbankan sebagai pendorong utama dalam pelaksanaannya (Dewi, 2020).



**Gambar 1. 2 Indeks Inklusi Keuangan di
Indonesia tahun 2013 - 2024**

Sumber: financial services authority (Indonesia)

Inklusi keuangan di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2024 menunjukkan bahwa semakin banyak orang Indonesia yang bisa mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan formal. Indeks inklusi keuangan di Indonesia sebesar 59,7% pada tahun 2013, tahun 2016 naik menjadi 67,8%, naik menjadi 76,19% di tahun 2019, dan tahun 2022 naik menjadi 85,1%. Peningkatan ini didorong oleh banyak hal, seperti kebijakan pemerintah yang mendukung inklusi keuangan. Pada tahun 2024 indeks inklusi keuangan menurun dari tahun-tahun sebelumnya, dan menyentuh 75,02%. Indeks inklusi keuangan bisa menurun karena faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global.

Meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam inklusi keuangan, tantangan utama yang dihadapi adalah masih banyaknya segmen masyarakat yang belum sepenuhnya mengadopsi produk keuangan formal (Sariwulan et al., 2023). Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan, kurangnya pemahaman mengenai manfaat produk-produk keuangan, serta adanya ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan formal (Baroto, 2024). Untuk mencapai inklusi keuangan lebih menyeluruh, perlu diatasi beberapa masalah, termasuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait keuangan

serta memperluas akses layanan keuangan formal di wilayah terpencil (Ramdhani, 2024). Masyarakat, khususnya pelaku UMKM, harus memiliki pemahaman yang baik tentang dasar-dasar keuangan agar memudahkan UMKM dalam menyusun laporan keuangan untuk pengajuan kredit ke lembaga keuangan formal (Arisa, 2022). Oleh karena itu pemerintah menetapkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) dan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Kebijakan SNKI diharapkan akan membantu membangun sistem keuangan formal yang inklusif di Indonesia.



Gambar 1. 3 Tingkat Inklusi Keuangan Kepemilikan dan Penggunaan Akun

Sumber: Laporan Pelaksanaan SNKI (2023)

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kepemilikan akun dan tingkat penggunaan akun di Indonesia meningkat dari tahun 2011 hingga 2023, hingga mencapai 88,7%. Berdasarkan data Global Findex, tingkat kepemilikan akun pada awalnya berada di 19,6% pada tahun 2011, kemudian naik menjadi 36,1% pada tahun 2014 kemudian 48,9% pada tahun 2017. Sejak SNKI pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2016. Kedua grafik ini menunjukkan kemajuan besar dalam inklusi keuangan, dengan semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan keuangan dan menggunakannya secara aktif. SNKI mempunyai tujuan untuk

meningkatkan akses masyarakat pada produk layanan keuangan (Dyah Praptitorini et al., 2022).

Tabel 1. 5 Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan

Keterangan	Hasil Survei	
	2023	2024
Literasi Keuangan	69,70%	65,43%
Inklusi Keuangan	64,30%	75,02%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2024)

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 02 Agustus 2024 terhadap 10.800 responden, menunjukkan indeks literasi keuangan pada tahun 2024 mengalami penurunan dan inklusi keuangan mengalami kenaikan. Hasil SNLIK tahun 2024 akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan. Untuk meningkatkan inklusi keuangan, OJK akan mendorong pelaku pasar agar memanfaatkan platform digital dalam menyediakan produk dan layanan keuangan, sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam mendorong inklusi keuangan adalah peningkatan literasi keuangan. Banyak masyarakat terutama pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami cara kerja produk keuangan, seperti kredit dan asuransi, serta manfaat yang dapat mereka peroleh dari penggunaan produk-produk tersebut (Ramdhani, 2024). Oleh karena itu, upaya edukasi dan sosialisasi mengenai produk-produk keuangan sangat penting agar pelaku UMKM lebih terbuka terhadap penggunaan layanan keuangan formal (Soetiono & Setiawan, 2018).

Inklusi keuangan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih terdapat ketimpangan dalam sektor-sektor tertentu. Salah satu sektor yang baru mulai berkembang dalam hal inklusi keuangan adalah asuransi. Sebelumnya, banyak masyarakat, terutama pelaku UMKM, merasa

kurang teredukasi dan memiliki akses terbatas terhadap produk asuransi (Pamujiningtyas, 2022). Kebijakan keuangan inklusif juga mempermudah jangkauan UMKM untuk mendapatkan suntikan modal untuk mengembangkan usahanya (Ulfah, 2024).

Dengan semakin berkembangnya produk asuransi mikro yang difasilitasi oleh teknologi, inklusi keuangan dalam sektor asuransi kini mulai memperlihatkan peningkatan. Asuransi mikro menawarkan premi yang lebih terjangkau dan jangkauan yang lebih luas, khususnya bagi pelaku UMKM yang sebelumnya merasa asuransi adalah produk yang mahal dan rumit (Artika & Shara, 2021). Selain itu, produk-produk ini sering kali disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelaku UMKM, seperti asuransi kesehatan, asuransi usaha mikro, atau asuransi jiwa yang berfokus pada perlindungan usaha kecil (Miftahul Fauzi, 2024). Keberadaan asuransi mikro yang lebih sederhana dan mudah diakses menjadi solusi penting untuk mendorong adopsi asuransi di kalangan UMKM yang baru terpapar dengan konsep perlindungan finansial (Dewi, 2020).

Menurut data dari Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), pemerintah membantu para UMKM dengan cara memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR merupakan program pemerintah yang menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM yang disalurkan melalui bank dengan menggunakan sistem penjaminan (Rosyda, 2023). Menjelang akhir tahun 2024, penyaluran KUR telah melebihi target yang ditetapkan, dengan realisasi mencapai Rp280,28 triliun pada 23 Desember 2024, atau 100,10% dari target tahunan. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, penyaluran KUR tahun 2025 diperkirakan akan mencapai Rp300 triliun, agar program tersebut dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan penyaluran KUR telah diberikan kepada 43 penyedia KUR aktif.

Produk layanan keuangan yang semakin populer di kalangan pelaku UMKM adalah investasi (Ermawati et al., 2023). Beberapa UMKM mulai mengalokasikan sebagian keuntungan mereka untuk berinvestasi, baik dalam bentuk saham, reksa dana, maupun investasi lainnya, untuk memperkuat kondisi keuangan dan menciptakan pendapatan

tambahan (Naurah, 2023). Meskipun demikian, akses terhadap produk investasi ini masih terbatas, terutama bagi pelaku UMKM dengan tingkat literasi keuangan yang rendah (Pontoh et al., 2020). Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi yang memadai agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan produk-produk keuangan dengan lebih optimal dan bijak.

Salah satu layanan keuangan yang masih kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku UMKM adalah asuransi (Pamujiningtyas, 2022). Meskipun banyak produk keuangan yang membantu UMKM dalam mengelola arus kas dan memperoleh modal usaha, perlindungan terhadap risiko usaha seperti kerugian akibat kebakaran, bencana alam, atau pencurian masih sering diabaikan. Wahyudin Rahman, Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (KUPASI), mengatakan bahwa, lebih dari 66 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya 10% yang telah mengadopsi asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya perlindungan keuangan di kalangan pelaku UMKM masih rendah. Di Kota Bandung inklusi keuangan berkembang dengan baik namun masih menghadapi beberapa tantangan (Fadilah et al., 2022).

Fungsi utama asuransi ialah memberikan perlindungan terhadap aset milik perusahaan dari kejadian yang tidak diinginkan, seperti pencurian, kebakaran dan kerugian akibat bencana alam (Pamujiningtyas, 2022). Agar pelaku UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan di tengah ketidakpastian bisnis, asuransi lah yang menjadi salah satu komponen penting dalam manajemen risiko. Meskipun menawarkan banyak manfaat, banyak dari mereka menghadapi beberapa kesulitan untuk mendapatkan perlindungan yang tepat. Ini yang membuat mereka enggan untuk memiliki produk asuransi (Baroto, 2024).

Menurut OJK mayoritas masyarakat masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai karakteristik berbagai produk dan layanan keuangan yang tersedia (Damara, 2021). Hal ini menyebabkan inklusi keuangan belum merata di seluruh lapisan masyarakat di Kota Bandung. Mira Rahmawaty, Deputy Direktur Kelompok Pengembangan UMKM, mengatakan bahwa masalah-masalah harus ditangani dan

diantisipasi sebaik mungkin untuk memperluas adopsi penggunaan teknologi keuangan dan mendorong inklusi keuangan yang lebih luas di kalangan pelaku UMKM. Masyarakat harus mulai memahami bahwa asuransi merupakan bagian dari manajemen risiko yang memberikan jaminan dan proteksi terhadap harta benda maupun jiwa seseorang (Soetiono & Setiawan, 2018).

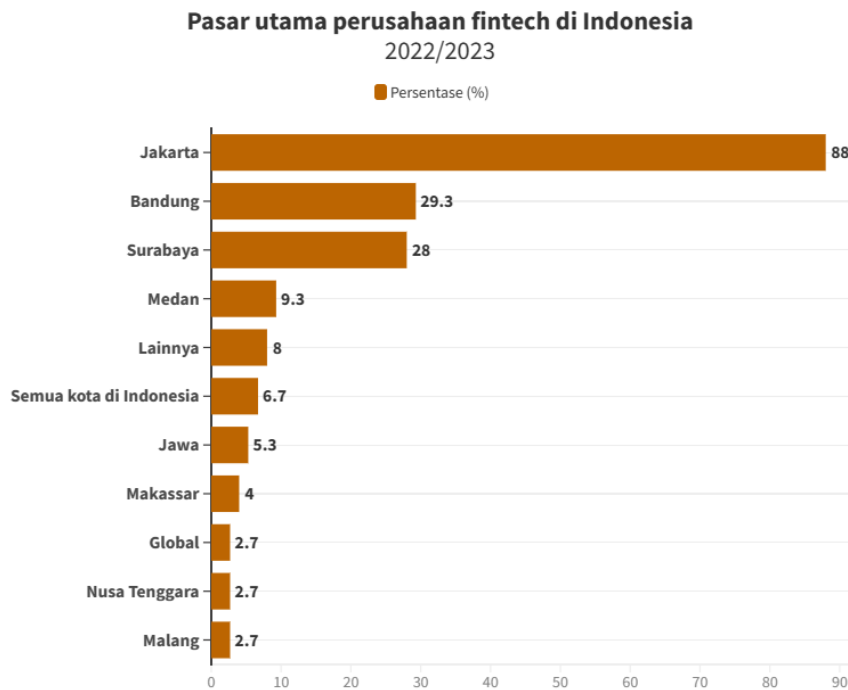
Pemerintah Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan bahwa inklusi keuangan sangat penting untuk pemberdayaan ekonomi, terutama bagi UMKM. Dengan terus mengutamakan edukasi keuangan dan memperluas akses terhadap layanan keuangan, pemerintah berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan bagi seluruh rakyat Indonesia (Wardhana et al., 2023).

Produk pembayaran digital memainkan peran penting dalam mempermudah transaksi bisnis UMKM. Dengan perkembangan teknologi, banyak pelaku UMKM kini menggunakan platform pembayaran digital untuk menerima pembayaran dari pelanggan, baik itu melalui transfer bank, kartu kredit, atau e-wallet (Marini et al., 2020). Produk ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi tetapi juga memungkinkan pelaku UMKM untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas, termasuk mereka yang lebih memilih untuk bertransaksi secara digital (Dyah Praptitorini et al., 2022). Oleh karena itu, layanan pembayaran digital menjadi salah satu produk keuangan yang sangat mendukung kemajuan UMKM di era digital saat ini.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, kini banyak aktivitas yang dapat dilakukan tanpa perlu berinteraksi langsung. *Financial Technology (Fintech)* atau Teknologi Keuangan merupakan kombinasi antara jasa keuangan dengan teknologi yang telah mengubah model bisnis tradisional menjadi lebih modern. *Fintech* dapat meningkatkan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan transaksi keuangan dengan menerapkan teknologi dan model bisnis inovatif (Wardhana et al., 2023). *Fintech* dapat menjangkau masyarakat yang kurang terlayani oleh layanan keuangan konvensional dengan menyediakan akses yang lebih mudah, cepat dan efisien terhadap layanan keuangan (Baroto, 2024).

Di Indonesia, sektor *fintech* telah berkembang dengan pesat, diawali dengan meningkatnya transaksi pembayaran digital, kemudian berkembang ke berbagai industri guna memenuhi kebutuhan finansial bagi *startup* maupun UMKM. Di tengah pesatnya perubahan teknologi digital, digitalisasi UMKM merupakan langkah penting untuk mempercepat perkembangan UMKM (Wardhana et al., 2023). Kemudahan proses pembayaran melalui *fintech* mendorong pertumbuhan yang pesat, sehingga konsumen semakin memilih *fintech* sebagai metode pembayaran (Putri et al., 2022). Evolusi ini menunjukkan kemampuan adaptif dan berbagai inovasi dalam industri *fintech* di Indonesia.

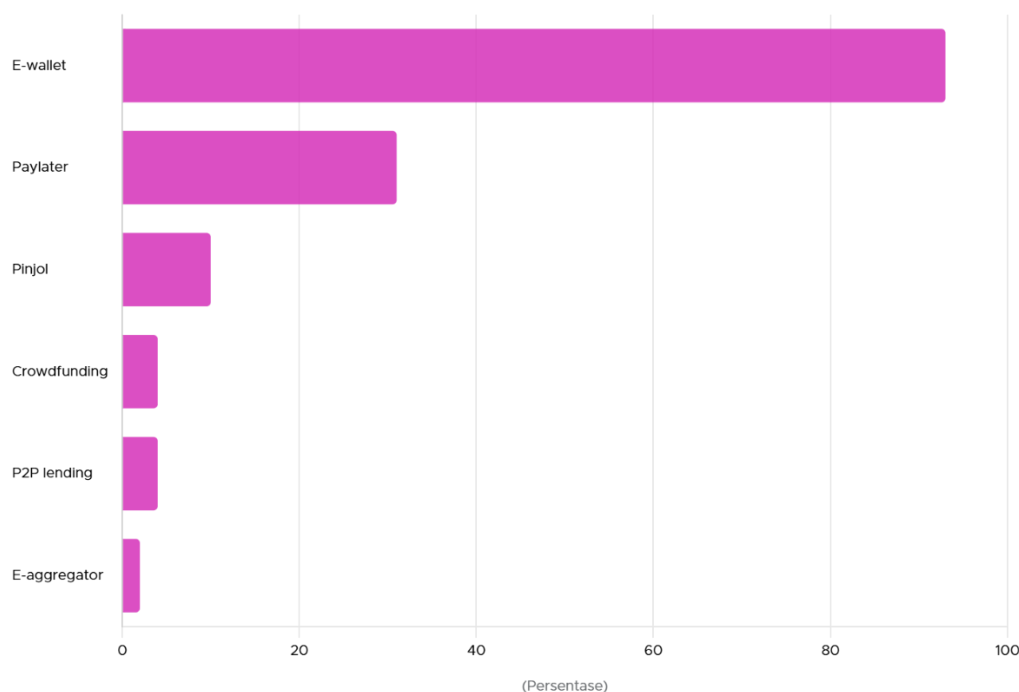
Dengan teknologi, pelaku UMKM dapat mengelola keuangan mereka, mendapatkan pembiayaan, dan melindungi usaha mereka dengan cara yang lebih terjangkau dan praktis, terutama bagi mereka yang berada di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan tradisional (Arisa, 2022). Meskipun adopsi teknologi keuangan di kalangan UMKM masih terbatas, teknologi menawarkan peluang besar untuk menjembatani kesenjangan ini (Muzdalifa et al., 2018). Layanan seperti pembayaran digital, *paylater*, dan produk asuransi berbasis teknologi memungkinkan UMKM untuk mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien.



Gambar 1. 4 Pasar Utama Perusahaan *Fintech* di Indonesia.

Sumber: databoks.katadata.co.id (2023)

Berdasarkan laporan mengenai riset yang dilakukan oleh Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) dan Katadata *Insight Center* (KIC), Pulau Jawa menduduki pasar utama perusahaan *fintech* di Indonesia. Jakarta memimpin pasar *fintech* dengan 88%, Kota Bandung menduduki posisi kedua dengan 29,3%, diikuti oleh Surabaya dengan 28%. Data ini menunjukkan bahwa perusahaan *fintech* dominan berada di kota-kota besar seperti Jakarta, namun juga adanya pertumbuhan yang signifikan di kota-kota lain seperti Bandung dan Surabaya. Dengan adanya indeks ini, diharapkan kerja sama antara pemerintah daerah dengan lembaga lokal untuk mendorong adopsi *fintech* serta membangun ekosistem yang mendukung inklusi keuangan (Naurah, 2023). Perusahaan *fintech* harus memperluas layanan mereka ke seluruh wilayah Indonesia, serta menjangkau kepada pelaku UMKM, masyarakat yang tidak dapat mengakses layanan keuangan serta generasi millennial dan Gen Z.



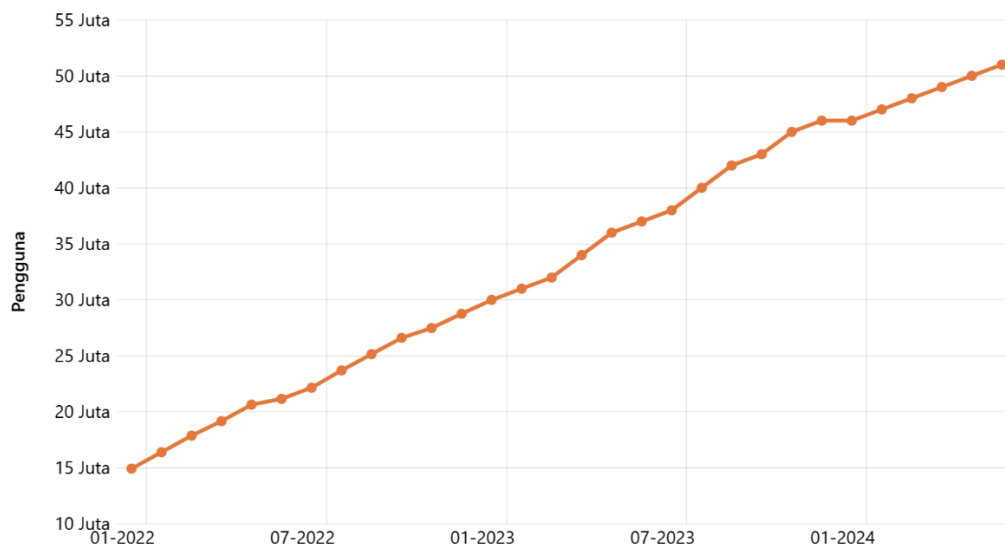
Gambar 1. 5 Produk *Fintech* Populer di Indonesia

Sumber: data.goodstats.id (2024)

Menurut hasil survei DailySocial, *e-wallet* menjadi produk *fintech* terpopuler di Indonesia. Terdapat 93% responden yang memiliki *e-wallet* untuk melakukan pembayaran, disusul dengan *paylater* yang digemari oleh 32,5% responden dan posisi ketiga terdapat pinjaman *online* dengan 10% responden. Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih *platform fintech*, seperti fitur yang menarik, reputasi perusahaan, promosi yang ditawarkan, serta rekomendasi dari orang terdekat turut menjadi faktor dalam memilih *platform fintech*. Sejalan dengan perkembangan *fintech*, berbagai metode pembayaran digital turut berkembang, seperti ATM, kartu kredit dan debit, *e-money*, *internet banking*, *mobile banking*, dan *QR code*, termasuk pembayaran digital.

Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019, yang mengatur penerapan *Quick Respon Code* (*QR Code*), dibuat oleh Bank Indonesia untuk mengatur pembayaran elektronik. Standar *QR Code* nasional yang telah ditetapkan oleh Bank

Indonesia adalah *Quick Respon Code Indonesian Standard* (QRIS), yang dimaksudkan untuk membuat proses pembayaran secara domestik dapat lebih mudah dan aman (Bank Indonesia, 2019). Pemerintah Indonesia, bersama sejumlah mitra industri, telah mengedukasi dan melatih pelaku UMKM terkait penggunaan QRIS (Purwanto et al., 2024). Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan terus mendorong pelaksanaan transformasi digital di sektor keuangan guna mendorong sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Diharapkan para pelaku UMKM dapat memanfaatkan *fintech* untuk melakukan pembayaran dan mengelola keuangan bisnis mereka dengan baik dengan teknologi ini.

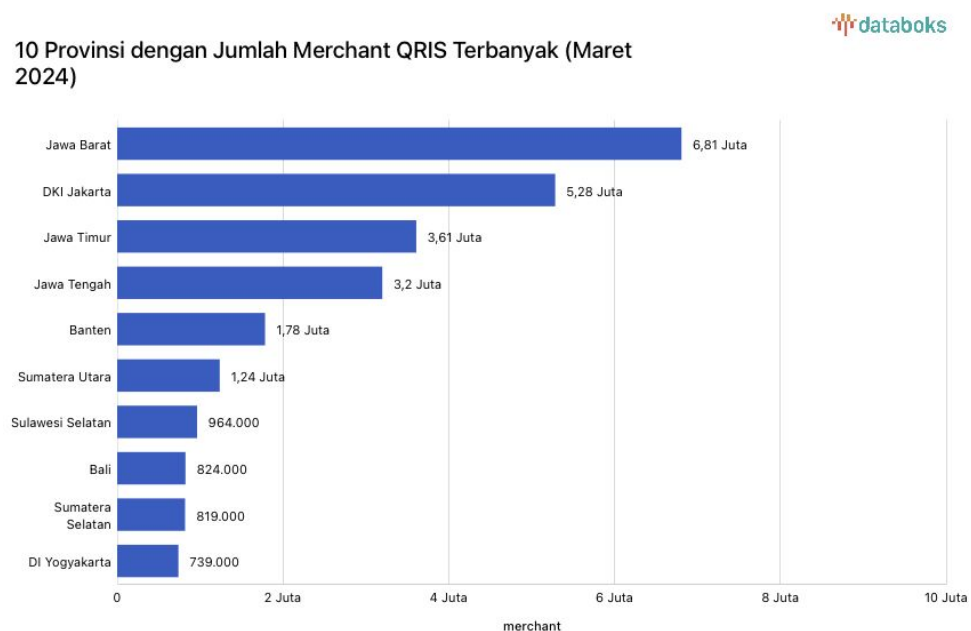


Gambar 1. 6 Jumlah Pengguna QRIS (2022-2024)

Sumber: databoks.katadata.co.id (2024)

Berdasarkan data Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), memperlihatkan peningkatan jumlah pengguna *Quick Respon Code Indonesian Standard* (QRIS) dari awal tahun 2022 hingga awal tahun 2024. Peningkatan jumlah pengguna ini sejalan dengan bertambahnya pedagang (*merchant*) yang menerima pembayaran melalui QRIS. Dimulai dengan sekitar 15 juta pengguna pada Januari 2022, yang terus meningkat setiap bulan. Pada pertengahan 2022, jumlah pengguna mencapai 20 juta dan melampaui 30 juta pada awal 2023. Pertumbuhan ini terus berlanjut secara stabil,

hingga mencapai sekitar 50 juta pengguna pada akhir 2023 dan awal 2024. Pertumbuhan jumlah konsumen dan pedagang turut mendorong peningkatan transaksi. ASPI melaporkan bahwa selama semester I 2024, volume transaksi QRIS naik 196% dibandingkan dengan semester I 2023, sementara nilai transaksinya meningkat sebesar 191%. Grafik tersebut menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dalam penggunaan QRIS, menandakan adopsi yang semakin meluas di masyarakat sebagai salah satu metode pembayaran digital.



Gambar 1. 7 Provinsi Dengan *Merchant* QRIS Terbanyak (Maret 2024)

Sumber: Databoks Indonesia (2024)

Berdasarkan data terbaru dari Asosiasi Pembayaran Indonesia (ASPI), tercatat sekitar 32 juta pelaku usaha yang telah menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran. Data diatas menunjukkan Provinsi Jawa Barat memimpin dengan 6,81 juta *merchant*, menunjukkan Tingkat adopsi QRIS yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Menurut kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat hingga saat ini, sekitar 90% pedagang di Jawa Barat telah mengaktifkan layanan transaksi menggunakan QRIS. Tingginya penggunaan QRIS ini didorong oleh

kemudahan dan kecepatan dalam melakukan pembayaran digital, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Bandung (Putu et al., 2022).

Mulai 1 Juli 2023, Bank Indonesia memberlakukan *Merchant Discount Rate* (MDR), yaitu biaya yang dibebankan oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) kepada pedagang. Bank Indonesia tidak mengambil bagian dalam MDR tersebut dan MDR tersebut akan diberikan sepenuhnya kepada industri yang terlibat. Untuk saat ini, biaya MDR QRIS yang berlaku sebesar 0% untuk transaksi dibawah Rp100.000 dan biaya 0,3% untuk transaksi diatas Rp100.000 (Situmorang, 2024). Per 1 Desember 2024, Bank Indonesia menerapkan biaya MDR QRIS 0% untuk transaksi pada *merchant* usaha mikro hingga Rp500.000. Industri pembiayaan *fintech* berkembang dengan pesat dan kini menjadi pilihan yang dapat di akses oleh semua lapisan masyarakat melalui inklusi keuangan, yang merupakan salah satu cara untuk mengenalkan sektor keuangan, terutama untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan (Candraningrat et al., 2021).

Berdasarkan uraian data diatas, dapat disimpulkan bahwa *fintech* telah memungkinkan UMKM untuk memanfaatkan teknologi agar peluang sukses mereka lebih besar. Namun, masih terdapat pelaku UMKM khususnya sektor kuliner memiliki kendala dengan QRIS dan rendahnya kepemilikan asuransi bisnis pada pelaku UMKM sektor kuliner. Dengan demikian peneliti berencana untuk melakukan pra kuisisioner guna memahami lebih dalam terkait kendala yang dihadapi UMKM dalam menggunakan QRIS serta alasan dibalik rendahnya kepemilikan asuransi di kalangan pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bandung. Di bawah ini akan disajikan hasil pra kuisisioner yang sudah disebarakan kepada 30 responden pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bandung. Adapun hasil yang diperoleh, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 6 Hasil Pra Survei Variabel Finansial Teknologi

No	Pertanyaan	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1	Apakah usaha Anda sudah menggunakan QRIS untuk	100% (30 Orang)	(0 Orang)

	menerima pembayaran dari pelanggan?		
2	Apakah transaksi menggunakan QRIS lebih efisien dibandingkan metode pembayaran lainnya?	93,3% (28 Orang)	6,7% (2 Orang)
3	Apakah pernah mengalami kesulitan saat menarik dana dari QRIS ke rekening usaha?	70% (21 Orang)	30% (9 Orang)

Sumber: Data Olahan Penulis (2024)

Berdasarkan hasil pra survei pada tabel 1.6 diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan QRIS salah satu aspek teknologi finansial pada UMKM sektor kuliner di Kota Bandung, menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) sudah menggunakan QRIS untuk menerima pembayaran. Selain itu (93,3%) responden mengaku menggunakan QRIS lebih efisien dibandingkan dengan metode pembayaran yang lain. Namun (70%) responden mengaku kesulitan saat ingin menarik dana dari QRIS ke rekening usaha. Data ini menunjukkan bahwa meskipun QRIS telah digunakan secara luas oleh UMKM dan dinilai efisien, masih terdapat tantangan dalam proses penarikan dana.

Tabel 1. 7 Hasil Pra Survei Variabel Inklusi Keuangan

No	Pertanyaan	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1	Apakah usaha Anda sudah memiliki asuransi untuk perlindungan usaha?	3,3% (1 Orang)	96,7% (29 Orang)
2	Apakah berminat untuk membeli asuransi usaha dalam waktu dekat?	10% (3 Orang)	90% (27 Orang)
3			

	Apakah akan mempertimbangkan untuk menggunakan asuransi usaha lebih sering di masa depan jika kendala yang Anda alami dapat diatasi?	13,3% (4 Orang)	86,7% (26 Orang)
--	--	--------------------	---------------------

Sumber: Data Olahan Penulis (2024)

Berdasarkan hasil pra survei pada tabel 1.7 mayoritas responden (86,7%) belum menunjukkan keinginan untuk menggunakan asuransi jika kendala yang mereka alami dapat diatasi. Rendahnya tingkat adopsi asuransi usaha ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam kemudahan dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan UMKM di Kota Bandung. Regulator seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga terakut sebaiknya memberikan edukasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep inklusi keuangan (Kartawinata et al., 2021). Dikarenakan responden untuk pra survei hanya 30 pelaku usaha sektor kuliner, maka peneliti akan melanjutkan survei dengan jangkauan yang lebih luas lagi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rita Atarwaman, Paskanova Christi dan Wildo Natalio terkait pengaruh *financial technology* terhadap inklusi keuangan UMKM pengguna QRIS (2023) menyatakan bahwa, *cashless payment* berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan pada salah satu UMKM sektor kuliner di Kota Ambon (Atarwaman et al., 2023). Penelitian ini menekankan bahwa pentingnya edukasi terhadap pelaku UMKM agar mereka dapat mengalokasikan dana untuk pertumbuhan bisnis mereka dengan lebih efisien.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Inne Fadilah, Sulaeman Rahman dan Mokhammad Anwar (2022) terkait dengan analisis pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan, dan *financial technology* terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bandung, menunjukkan bahwa *financial technology* dan inklusi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Artinya semakin tinggi

financial technology dan inklusi keuangan maka akan berdampak pada kinerja UMKM di Kota Bandung yang semakin tinggi (Fadilah et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Asif, Mohd Naved Khan, Sadhana Tiwari, Showkat K. Wani dan Firoz Alam terkait *The Impact of Fintech and Digital Financial Services on Financial Inclusion in India* (2023), menunjukkan bahwa *fintech* telah berpengaruh secara signifikan terhadap inklusi keuangan di India, terutama bagi masyarakat menengah kebawah. Selain itu regulasi dan kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah sangat penting untuk memaksimalkan dampak *fintech* dalam meningkatkan inklusi keuangan di India (Asif et al., 2023).

Berdasarkan uraian fenomena pada latar belakang dan hasil penelitian sebelumnya, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Implementasi Teknologi Keuangan QRIS Terhadap Inklusi Keuangan (Studi Kasus Pelaku UMKM Sektor Kuliner Di Kota Bandung)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan permasalahan yang telah dijelaskan di latar belakang, pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bandung masih memiliki beberapa kesulitan terkait penggunaan QRIS dan rendahnya inklusi keuangan di kalangan pelaku UMKM di Kota Bandung. Maka berdasarkan fenomena tersebut peneliti membuat perumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana teknologi keuangan (penggunaan QRIS) di UMKM Sektor Kuliner Kota Bandung?
2. Bagaimana inklusi keuangan di UMKM sektor kuliner Kota Bandung?
3. Bagaimana teknologi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui teknologi keuangan (penggunaan QRIS) di UMKM sektor kuliner di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui inklusi keuangan UMKM sektor kuliner di Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui teknologi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

A. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang cara menganalisis dan memecahkan masalah dengan menggabungkan teori yang dipelajari dengan bukti di lapangan tentang finansial teknologi dan inklusi keuangan, khususnya pada UMKM. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan literatur akademik yang berkaitan dengan finansial teknologi dan inklusi keuangan terutama di sektor UMKM kuliner.

B. Aspek Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bandung mengenai manfaat finansial teknologi dalam meningkatkan akses mereka terhadap layanan keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan pengaruh finansial teknologi terhadap inklusi keuangan bagi pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bandung.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan umum yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup kajian teori yang berhubungan dengan finansial teknologi, inklusi keuangan, UMKM sektor kuliner di Kota Bandung dan pembahasan mengenai kerangka pemikiran dan hipotesis.

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini penulis menggunakan metode kuantitatif yang akan membahas tentang variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validitas dan reabilitas serta teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian serta menyampaikan pengulasan hasil penelitian.

e. BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian, serta saran hasil penelitian dan saran bagi yang melakukan penelitian selanjutnya.